

BAB IV KESIMPULAN

Politik luar negeri China dapat dikatakan sebagai dasar dari peran yang dilakukan oleh China pada masalah dan wilayah tertentu diluar bayang-bayang negara sekutunya. Kebijakan China terhadap Suriah adalah kebijakan non-intervensi (*non-intervention policy*). Setelah kebijakan luar negerinya yang menyatakan bahwa China mendukung adanya intervensi secara diplomatik dan bukan militer, peran nyata China juga diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan luar negerinya di Suriah, peran China diantaranya:

- a. Peran China jika dilihat dari politik luar negerinya adalah menjadi promotor aktif multilateralisme dalam korrdinasi dan kerjasama antar negara-negara besar. Jika konflik Suriah didominasi oleh AS dan Russia saja itu menyebabkan ketidakadilan dan menjadi tidak masuk akal bagi seluruh rakyat Suriah dan TimTeng. Hal tersebut membuat peran China menjadi sangat penting dan tidak tergantikan.
- b. Peran China selanjutnya adalah China memutuskan untuk memveto lima draft resolusi DK PBB dimana dalam kelima draft rsolusi tersebut diprakarsai oleh negara-negara Barat dan berisi mengenai konsep R2P yang akan diberlakukan di Suriah. Pernyataan China pada draft-draft resolusi ini ialah kedaulatan dan integritas territorial (*Territory Integrity*) Suriah harus dihormati dan setiap tindakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip pada piagam PBB dimana tidak ada intervensi terhadap urusan internal suatu negara. yang terpenting adalah, Veto China dapat dianggap sebagai upaya untuk menegaskan kembali kepada dunia bahwa masih ada cara lain untuk menyelesaikan konflik di Suriah yaitu prinsip non-intervensi. China menganggap bahwa tidak ada keuntungannya dari mendukung draft resolusi terhadap Suriah. Seperti halnya dengan yang terjadi di Libya, China khawatir bahwa negara-negara Barat akan menerima prestise internasional sementara masyarakat internasional akan

melihat persetujuan China sebagai kelemahan atau sebagai tindakan untuk mendapatkan dukungan internasional.

- c. Peran China selanjutnya adalah dalam bidang diplomasi, dimana Kementerian Luar Negeri China mengirim delegasi senior ke Suriah, Mesir, Arab Saudi, Qatar, Iran, Yordania, Israel dan Palestina untuk melakukan diskusi diplomatik. Melalui diplomasi proaktif ini China mempunyai tujuan untuk membuka dialog untuk mempromosikan proses politik inklusif yang akan diterapkan di Suriah. Selain itu pada Desember 2013, Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein mengunjungi China dan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Dalam pertemuannya dengan Xi Jinping, Raja Yordania meminta dukungan China untuk mengatasi situasi di Suriah seperti pengaruh negara lain yang tumbuh di wilayah tersebut. Raja Yordania juga menyerukan bahwa China harus menggunakan pengaruhnya untuk membantu menyelesaikan konflik di Suriah. Bagi China konflik di Suriah adalah konflik domestik yang dipandang sebagai urusan internal. China menjaga hubungannya dengan pemerintah Assad dimana China menghimbau kepada semua partai politik di Suriah untuk menemukan solusi politik. Selain itu, China juga menghubungi pihak-pihak anti-Assad dan mengundang mereka untuk mengunjungi China
- d. Peran China juga terlihat pada Konferensi Perdamaian Jenewa II (Geneva II Peace Conference) yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 2014 yang di dukung oleh PBB. Masyarakat internasional mempunyai harapan yang besar pada konferensi ini untuk mengakhiri konflik di Suriah. Agenda pada konferensi ini adalah untuk mempertemukan perwakilan dari kedua pihak yaitu pemerintahan Presiden Bashar al-Assad dan oposisi politik yang didukung Barat untuk pertama kalinya sejak konflik yang dimulai hampir tiga tahun yang lalu. Para pemimpin dari seluruh dunia (termasuk Menteri Luar Negeri China Wang Yi) mempunyai harapan untuk membawa perdamaian di Suriah.

Dalam persiapannya dalam konferensi Jenewa II, Wang Yi mengajukan lima poin usulan untuk konflik Suriah. menyangkut dengan isi usulan tersebut

diutarakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Hong Lei pada konferensi pers. Lima poin tersebut adalah Konflik di Suriah harus diselesaikan dengan cara penyelesaian secara politik, nasib dari konflik Suriah “harus diputuskan oleh rakyatnya sendiri” ,proses transisi politik Suriah harus “inklusif”, Suriah harus mencapai “rekonsiliasi nasional dan persatuan”, masyarakat internasional harus memberikan bantuan kemanusiaan ke Suriah dan juga e negara-negara tetangganya Proposal ini mewakili sikap umum China pada Suriah. Hong menjelaskan posisi China disini lebih kearah yang positif dan lebih obyektif serta adil. Hong juga menyatakan bahwa China tidak memikirkan kepentingannya dalam memutuskan untuk mengajukan usulan lima poin in, berbeda dengan negara-negara lain seperti AS, Rusia dan Iran yang memiliki kepentingan tertentu dalam melihat konflik Suriah dan memilih untuk menyelesaikan dengan satu cara.

Alasan China mengajukan usulan tersebut adalah memastikan konflik Suriah tidak mempengaruhi nnegara-negara di TimTeng. Kekerasan di Suriah yang sebagian besar didasarkan perpecahan Sunni-Syiah telah meluas ke Libanon dan Irak. Eskalasi lebih lanjut bisa mulai mengganggu perdagangan dalam wilayah TimTeng secara keseluruhan, hal tersebut dapat menjadi bencana bagi China mengingat lebih dari setengah impor minyaknya berasal dari TimTeng.

Terkait dengan hasil perundingan Konferensi Jenewa II, China kembali menyerukan kepada semua pihak di Suriah untuk terus berusaha dan memulai transisi politik inklusif sesegera mungkin sesuai dengan perundingan di Jenewa. Terkait dengan berita bahwa parlemen Suriah akan mengadakan pemilihan Presiden pada tanggal 3 Juni 2014, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qin Gang membuat pernyataan bahwa China sangat menaruh perhatian tinggi pada masalah Suriah dan krisis di Suriah telah membawa penderitaan bagi rakyat Suriah maka China meminta semua pihak untuk menghentikan kekerasan secepatnya dan mendorong transisi politik yang inklusif